**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang.**

Pergerakan arus informasi di era globalisasi dewasa ini menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan dan strateginya agar sesuai kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Semua sistem kehidupan, baik mikro maupun makro, perlu mengadakan pembaharuan dan pengembangan agar dapat mengimbangi kemajuan global. Tidak terkecuali sistem pembangunan dalam bidang pendidikan. Sistem pembangunan dalam bidang pendidikan nasional harus selalu dikembangkan agar dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat, baik lokal, regional maupun nasional.

Belakangan ini sistem pembangunan dalam bidang pendidikan banyak disorot oleh para pemerhati pendidikan. Bahkan, tidak sedikit pakar yang menyarankan adanya peningkatan anggaran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saran-saran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain peningkatan kualitas pendidikan, usaha yang dapat dilaksanakan dalam sistem pembangunan di bidang pendidikan adalah pemerataan pendidikan sekaligus pemerataan kualitas pendidikan.Seperti yang diketahui, bahwa terdapat perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara lembaga pendidikan yang ada di pulau Jawa dan lembaga pendidikan yang ada di luar pulau Jawa.Juga antara lembaga pendidikan negeri dengan lembaga pendidikan swasta.Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, terutama dalam hal pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sampai di daerah-daerah terpencil. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah melalui peningkatan kualitas pendidik, pembaharuan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, sebab kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh pemerintah dan setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan bagi anak-anak bangsanya, pemerintah mulai menyusun kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia.

Namun, memperhatikan kondisi pendidikan beberapa tahun belakangan ini, penyelenggara pendidikan tampaknya menghadapi kesulitan dalam menerapkan kurikulum yang berlaku. Berbagai kasus menunjukkan kurangnya pemahaman para penyelenggara pendidikan terutama yang berkaitan dengan peran dan fungsi pendidikan. Kekurangpahaman penyelenggara pendidikan tentang peran dan fungsi kurikulum dapat berakibat fatal terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti ketika penyelenggara pendidikan dihadapkan pada permasalahan ujian nasional (UN), mereka sering kelabakan dan takut jika anak didiknya tidak mampu menyelesaikan ujian dengan baik. Hal ini sangat disayangkan mengingat kurikulum merupakan komponen penting untuk membangun sistem pendidikan yang baik.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (**UU No. 20 Tahun 2003: tentang Sistem Pendidikan Nasional**). Dalam pengertian tersebut kurikulum merupakan seperangkat rancangan, landasan, model, pedoman dan sistem pembelajaran yang berorientasi pada tujuan sesuai jenjang pendidikan.Dapat dianalogikan bahwa kurikulum merupakan suatu hal komlpeks yang bersifat ‘urgen’ serta menjadi sebuah tolok ukur kualitas pendidikan dan kualitas bangsa.

Secara periodik kurikulum di Indonesia berkembang sesuai dengan kearifan zaman.Adapun bentuk perkembangan krikulum dikarenakan sifat dasar kurikulum yang dinamis.Sejarah membuktikan bahwa kurikulum merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks dan sistematis, ditinjau dari perkembangannya dari masa ke masa.Dalam kurikulum sebelum orde baru, dengan kata lain pada masa kolonial perkembangan kurikulum diatur dengan ototritas kaum kolonial pada masa itu. Seiring berkembangnya zaman tepatnya setelah kemerdekaan RI, Indonesia mulai membentuk Rencana Pelajaran pada tahun (1947) yaitu kurikulum pertama yang disusun lebih sistematis dan relevan namun strukturnya sangat sederhana, kemudian dilanjutkan dengan Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968 Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP) dan yang terakhir yaitu Kurikulum 2013.

Sejalan dengan otonomi daerah yang juga berbarengan dengan adanya otonomi pendidikan, makaperan pemerintah sangat penting dengan perlu bertindak semakin cerdas untuk memikirkan lebih jauh lagi tentang kondisi pendidikan di setiap daerah dengan tetap mengacu pada program pendidikan nasional seperti standar nilai, kurikulum dan sebagainya. Memikirkan disini bermaksud disamping meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20% seperti yang telah diisyaratkan dalam Undang-Undang, juga memikirkan langkah-langkah strategis untuk dijalankan agar pendidikan di setiap daerah dapat maju.

Dengan merujuk kepada upayapemerataan sistem pembangunan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka dalam perkembangan kondisi pendidikan saat ini penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman.

Dalam rangka upaya meningkatkan sistem pembangunan di bidang pendidikan kearah yang lebih baik, pemerintah mengeluarkan kebijakan perihal pelaksanaan **Kurikulum 2013 yang berlaku hingga saat ini**, melalui Kemendikbud telah menerbitkan peraturan baru yang dituangkan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013**tentang **Implementasi Kurikulum 2013.**Oleh karena kurikulum dipandang sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik, maka tujuan dibentuknya kurikulum 2013dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, membentuk manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kebijakandikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki beberapa penguatan yang melatarbelakangi perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) 2006 ke Kurikulum 2013, yakni *Pertama*, untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti globalisasi, WTO, ASEAN *Community*, APEC; masalah lingkungan hidup; kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan ekonomi kreatif dan lain-lain.*Kedua*, untuk kebutuhan kompetensi masa depan, seperti, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda dan lain sebagainya.

Lalu *Ketiga*, ada fenomena negatif di masyarakat sebagai kekurangan kurikulum lama, seperti muncul perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, korupsi dan gejolak masyarakat.*Keempat*, terdapatnya persepsi negatif masyarakat terhadap kurikulum yang ada, seperti, kurikulum 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan pendidikan karakter. Serta *Kelima*, disisi lain Kemendikbud RI menyatakan bahwa perubahan kurikulum KTSP 2006 ke Kurikulum 2013 ini adalah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan Kurikulum 2013, bahwa mengingat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut diambil dengan mempertimbangkan catatan dan evaluasi tentang pengganti Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk berubah ke Kurikulum 2013. Jika dilihat dari Kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia yaitu kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dapat kita lihat bagaimana metode dan sistem penerapan dengan Kurikulum 2013 yang telah diberlakukan saat ini sebagai bahan perbandingan.Hal itu meliputi,jika dilihat dari pengembangan kurikulum KTSP, kurikulum dikembangkan hanya sampai pada standar kompetensi dan kompetensi dasar.Dalam kurikulum KTSP, guru dituntut mengembangkan kompetensi dasar yang telah ditentukan menjadi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan karakterisrik siswa.

Lalu guru juga diberikan kebebasan menentukan buku referensi serta media. Akan tetapi, kenyataan di lapangan, guru cenderung memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Guru juga lebih mementingkan aspek kognitif dibanding aspek afektif dan psikomotor.Selanjutnya Berbeda dengan Kurikulum 2013 yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun, pengembangan kurikulum sudah mencakup silabus, buku teks, serta buku pedoman guru.

Hal tersebut akan meringankan pekerjaan guru karena tidak perlu membuat silabus lagi. Guru hanya tinggal membuat rencana pengajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebagian orang berpendapat, hal tersebut akan mematikan kreativitas guru karena semua sudah diatur dari pusat. Akan tetapi, jika dilihat kembali, Kurikulum 2013 ini masih memberikan peluang dan kebebasan kepada satuan pendidikan dan pendidik khususnya untuk melaksanakannya melalui pembelajaran dan penilaian. Tetapi dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara struktur Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP 2006.

Dari beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut.*Pertama*, dari pengertian struktur kurikulum itu sendiri, Kurikulum 2013 tidak menyebutkan adanya standar kompetensi mata pelajaran dan menggantinya dengan istilah kompetensi inti.*Kedua*, jumlah mata pelajaran pada kurikulum 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan KTSP.*Ketiga*, Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran dilakukan dengan pendekatan tematik terpadu atau tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI, berbeda dengan KTSP yang masih menggunakan pendekatan tematik terpadu dari kelas I sampai kelas III.*Keempat*, beban belajar yang dicantumkan pada Kurikulum 2013 mengalami penambahan dibanding KTSP. Dan yang *Kelima*, pengembangan Kurikulum 2013 mencakup silabus, buku teks murid, dan buku pedoman guru, berbeda dibanding KTSP yang hanya sampai pada kompetensi dasar.

Dari pemaparan perihal perbandingan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan Kurikulum 2013, peneliti dapat mencermati bahwa perbandingan kedua kurikulum yang terakhir digunakan di Indonesia tersebut terdapat beberapa alasan bagaimana dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan putusan kebijakan untuk perubahan kurikulum. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum karena kurikulum sebelumnya yaitu Kurikukum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dianggap memberatkan peserta didik. Dilihat dari terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuat siswa terbebani.Perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun ini.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberi keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah tidak berjalanmulus.Untuk tingkat Sekolah Dasar terjadi perubahan yang cukup besar. Misalnya Sekolah Dasar yang dulunya ada sepuluh mata pelajaran dikurangi menjadi tujuhmata pelajaran yaitu lima mata pelajaran utama (PPKn, Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Umum dan Matematika) dan dua mata pelajaran muatan lokal atau Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Berkurangnya mata pelajaran dalam kurikulum baru ini justru membuat lama belajar peserta didik di sekolah bertambah.Lalu upaya pemerintah yaitu Kementerian Pendidian dan Kebudayaanakan[menambah jam belajar di sekolah](http://www.sekolahdasar.net/2012/09/kemendikbud-akan-tambah-jam-belajar-di.html) untuk menangkal efek negatif dunia luar sekolah. Sebab waktu luang yang lebih banyak di luar sekolah dianggap memicu peserta didik melakukan atau bersentuhan dengan tindakan negatif.

Dari beberapa perbandingan Kurikulum Tingat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan Kurikulum 2013, serta alasan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam**Permendikbud No 81A Tahun 2013** tentang Implementasi Kurikulum 2013 sebagai kebijakan perubahan kurikulum. Hal ini mempertegas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan kurikulum tidak lain yakni untuk mengejar perubahan zaman. Karena zaman berubah dan terus berkembang, jelas sekali akademik, industri dan sosial budaya juga ikut berkembang. Oleh karena itu perubahan kurikulum harus dapat disesuaikan dengan perkembangan global, sehingga kedepannya tujuan implementasi Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan peserta didik dengan sikap yang baik, kompetensi, sosial, pengetahuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang sistem pembangunan di bidang pendidikan.

Selanjutnya yang menjadi sorotan penelitiyakni bahwa sejauhmana tingkat efektivitas kebijakan pemerintah perihal perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006dirubah dengan Kurikulum 2013 yangtelah diterapkan sejaktahun 2014 tersebut. Dalam hal inikebijakan yang telah dibuatselanjutnya perlu diimplementasikan atau kebijakan tersebut perlu dilaksanakan dilapangan.Pelaksanaan kebijakan tersebut,peneliti memfokuskan untuk melihat kondisi pendidikan di Kota Bandung yang tertuju pada tingkat Sekolah Dasar.Sesuai denganadanya otonomi pendidikan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya yakni pemerintah Kota Bandung dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandungdalam mendukung implementasi Kurikulum 2013.

Pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di Kota Bandung sudah dituliskan dalam **Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/20l4** sebagai tindaklanjut **Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013** tentang Implementasi Kurikulum 2013. Dengan ini terdapat didalamnya yaitu bahwa pemerintahdaerah khususnya Kota Bandungdiminta untuk melaksanakan tiga hal, yaitu menyiapkan anggaran penggandaan dan pendistribusian buku semester II tahun pelajaran 2016/2017 sampai ke sekolah untuk kelas jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh daerah khsusunya di Kota Bandung. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud, pemerintah daerah khususnya Kota Bandung diharuskanmemiliki anggaran dalam APBD Tahun Ajaran 2017 yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Khususnya untuk kegiatan penggandaan dan distribusi buku, pelatihan guru sasaran serta untuk melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Pemerintah pada tahun 2013 telah mengeluarkan kebijakan tentang Kurikulum 2013, bahwa kebijakan ini antara lain memberi ruang gerak yang luas kepada lembaga pendidikan khususnya Sekolah Dasar yang menjadi fokus penelitian ini. Upaya tersebut dalam mengelola sumber daya yang ada, dengan cara mengalokasikan seluruh potensi dan prioritas sehingga mampu melakukan terobosan-terobosan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Salah satu upaya kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi di Sekolah Dasar adalah dengan cara melakukan pembelajaran tematik.

Pembelajaran model ini akan lebih menarik dan bermakna bagi anak karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian masih banyak pihak yang belum memahami dan belum mampu menerapkan model ini secara baik khususnya penerapan Kurikulum 2013 pada sebagian besar Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandung.

Pembelajaran tematik Kurikulum 2013dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan.**Sutirjo dan Sri Istuti Mamik(2004:6)**menyatakan bahwa Pembelajaran tematikKurikulum 2013 merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematik Kurikulum 2013 dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi materi kurikulum.

Disamping itu pembelajaran tematik  Kurikulum 2013akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar.Merujuk pada **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013** mengenai **Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar** menegaskan bahwa Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar didesain dengan menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Sebelum diterapkannya Kurikulum 2013, penetapan pendekatan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar telah disebutkan pula oleh pemerintah melalui **Badan Standar Nasional Pendidikan** (**BNSP**) tahun 2006.Berdasarkan kondisi tersebut maka diketahui bahwa pembelajaran tematik bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah kependidikan di Indoneasia.

Namun penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 yang diaplikasikan pada tingkat Sekolah Dasar menimbulkan beberapa permasalahan, kendala dan hambatan yang terjadi secara keseluruhan. Banyak pakar, ahli dan pengamat pendidikan yang menilai bahwa Kurikulum 2013 kurang tepat diterapkan bagi siswa Sekolah Dasar.Penerapan Kurikulum 2013 berbasis pembelajaran tematik di Sekolah Dasar khususnya di Kota Bandung telah 3 tahun lebih bergulir dan relatif masih baru,  sehingga dalam  implementasinya belum sebagaimana yang diharapkan. Seperti halnya implikasi tersebut dialami Kepala Sekolah, misalnya sebagian besar Kepala Sekolah Dasar di Kota Bandung masih sulit menghadapi konsep Kurikulum 2013 tersebut.

Kunci sukses pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung khususnya adalah kepemimpinan dan keberadaan kepala sekolah, terutama dalam mengkoordinasikan, menggerakan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Upaya tersebut dapat dihadapi dengan cara Kepala Sekolah diikutkan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mensukseskan kurikulum 2013 pada tingkat Sekolah Dasar.

Hal tersebut berguna agarKepala Sekolah mampu mengelola manajemen perubahan dari konsep kurikulum 2006 (KTSP) yang berubah ke kurikulum 2013, dapat lebih mampu melaksanakan supervise akademik yang terintegrasi dan terstruktur, serta agardapat lebih mampu mengembangkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran terhadap pedoman kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar yang dipimpinnya. Namun optimalisasi program pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada sebagian Kepala Sekolah Dasar di Kota Bandung relatif masih belum intensif dan belum merata pula sampai dengan tahun ajaran 2017.

Permasalahan selanjutnya yakni masih banyak guru-guru Sekolah Dasar di Kota Bandung yang merasa masih kesulitan dalam melaksanakan penerapan Kurikulum 2013 berbasis pembelajaran tematik ini.Banyak sumber membuktikan bahwa guru-guru Sekolah Dasar di Kota Bandung mengaku masih kesulitan beradaptasi dengan hal-hal teknis, khususnya terkait teknis perubahan pola fikir (*mindset*)yang dituntut harus berinovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Permasalahan kesulitan beradaptasi dengan hal-hal teknis lainnya yang dialami kebanyakan guru Sekolah Dasar di Kota Bandung misalnya berkaitan dengan perubahan struktur dan desain Kurikulum 2013yang berubah-rubah karena adanya revisi-revisi dari peraturan pemerintah pusat. Lalu kesulitan guru dalam hal menentukan penilaian seperti Standar Kompetensi, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasarke dalam indikator dalam menentukan kata kerja operasional yang tepat. Serta guru kesulitan dalam mengembangkan tema pembelajaran dan ditambah adanya hambatan didalam proses belajar mengajar karena pengadaan buku pedoman guru dan buku siswa tidak tersedia dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung.

Kesulitan selanjutnya yaitu dari beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada sangat beragam pendekatannya sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk menggunakan, dan guru kesulitan dalam merumuskan keterpaduan berbagai mata pelajaran pada langkah pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).Dari beberapa pemaparan permasalahan ini terjadi antara lain karena pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Bandungsejauh ini masih belum optimal dan masih belum merata pula dalammemfasilitasi sebagian besar guru-guru Sekolah Dasar di Kota Bandung sampai pada tahun 2017 untuk mendapatkan pelatihan secara intensif tentang Konsep Kurikulum 2013. Lalu pemberian fasilitas sarana buku pedoman guru yang belum memadaimenjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung.

Dari berbagai pemaparan perihal pentingnya Pendidikan dan Pelatihan bagi guru,karena keterlibatan guru sebagai pelaksana ujung tombak dan faktor utama dalam mencapai efektivitaspelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar khususnya di Kota Bandung. Hal itu meliputi mekanisme proses, penilaian dan esensial pembelajaran, bahwa perbandingan penerapan Kurikulum 2013sangat berbeda dengan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Maka dari itu peran guru sangat diperlukan untuk mencipatakaninovasi, kreatifitas,pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap perkembangan pembelajaran kurikulum yang saat ini diterapkan agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Laludari hasil penelusuran yang telah dilakukan yakni kondisikebanyakan siswa Sekolah Dasar di Kota Bandung sejauh ini masih menemui permasalahan dalam menghadapimodel pembelajaran Kurikulum 2013.Permasalahan pertama yakni, kesulitan mengembangkan pembelajaran bagi siswa kelas 2, 3, 5 dan 6 sebab masih dalam proses transisi dalam penerapan Kurikulum 2013. Letak permasalahannya yaknikesulitan guru untuk mengoptimalkan metode pembelajara tematik terpadu kepada siswa, karena buku siswa yang tidak tersedia bagi kelas 2, 3, 5 dan 6.

Kesulitan siswa dalam perubahan metode pembelajaran dari KTSP ke Kurikulum 2013 dikarenakan guru masih banyak yang belum bisa men-tematik-kansiswa kelas 2, 3, 5 dan 6 dari semua pelajaran pada tema tertentu dan masih perlu pemahaman yang luas. Permasalahan selanjutnya adalah pada kegiatan pembelajaran yang diterapkan Kurikulum 2013 dengan tidak tersedianya buku siswa berdampak menjadi sempitnya materi bahan ajar yang menuntut siswa untuk menggali sumber-sumber bahan pembelajaran, karena guru sulit mengembangkan pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan seadanya.

Lalu keberadaan sekolah tidak lepas pula dari permasalahan penerapan Kurikulum 2013. Hal ini terbukti bahwa kondisi Sekolah Dasar di Kota Bandung yang telah menerapkan Kurikulum 2013 sejauh ini masih mengalami sejumlah problematika yang telah ditelusuri oleh berbagai sumber, misalnya berimplikasikepada otonomi Sekolah Dasar yang menggunakan Kurikulum 2013 di Kota Bandung dalam pengembangan kurikulum menjadi berkurang. Lalu adanya kesenjangan antara Sekolah Dasar piloting sebagai sekolah percobaan dengan Sekolah Dasar mandiri.Hal itu terlihat dari pemberian fasilitas kebutuhan pelatihan guru dan fasilitas sarana prasaran yang diberikan Sekolah Dasar piloting lebih terpenuhi oleh pemerintah ketimbang Sekolah Dasar mandiri yang ada di Kota Bandung.

Dengan demikian, secara kapasitasnya bahwa masih banyak Sekolah Dasardi Kota Bandung yang belum siap dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013.Hal itu terjadi karena pemerintah daerah yang dinaungi Dinas Pendidikan Kota Bandung sejauh ini belum optimal dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, pengarahan dan pengawasan yang terintegrasi kepada sejumlah Sekolah Dasar di Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013.

Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan **Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013**tentang implementasi Kurikulum 2013 khususnya tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sejauh ini belum berjalan efektif dan masih diperlukannya evaluasi implementasi. Dengan begitu langkah yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung yaknimengoptimalkan segala cara agarpelaksanaan kurikulum 2013tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.Berdasarkan latar belakang, fokus penelitiandan konteks permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul**Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.**

**1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan fokus masalah sebagai berikut:

Pembangunan nasional melalui sistem pendidikan dengan digulirkannya kebijakan **Permendikbud RI No 81A Tahun 2013** tentang Implementasi Kurikulum 2013 sebagai perangkat dan alat untuk mengembangkan serta meningkatkan program pendidikan di Indonesia khususnya tingkat Sekolah Dasar sebagai fokus penelitian ini. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

**1.3 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak terhadap permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

**1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, diharapkan antara lain:

1. Mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

**1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan antara lain.

1. Kegunaan Teoritis:

a. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

b. Untuk kepentingan akademis, dalam hal ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh Skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

1. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung terutama mengenai Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.